

BAB I

PENDAHULUAN

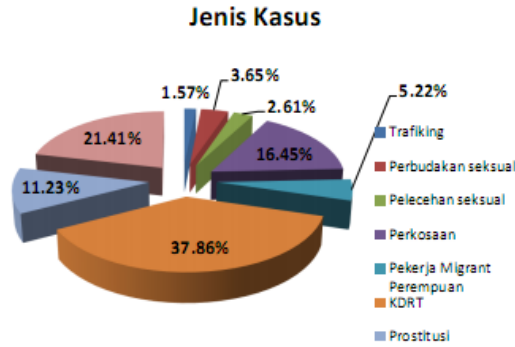
1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan melalui Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di ranah personal secara nasional tercatat sebagai kasus yang paling tinggi. CATAHU merangkum bahwa menurut data Pengadilan Agama, tercatat sejumlah 245.548 kasus merupakan kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 10.205 kasus.

Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan hal yang sama, KDRT/RP menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus (21%), kekerasan terhadap anak 1.799 kasus (17%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di ranah rumah tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus) (CATAHU KOMNAS Perempuan).

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di Kota Solo pada Minggu (21/4/2013) di Jagalan, seorang suami menghajar istrinya hingga meninggal. Bermula dari perdebatan kemudian terjadi kekerasan fisik, pelaku menendang korban hingga tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke RS Dr Oen Solo, namun setelah sampai di RS, pihak RS menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia (SOLO POS).

Hasbiyanto (dalam Sugihastuti & Saptiawan, 2010:173) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Meiyenti (dalam Sugihastuti & Saptiawan, 2010:173) menjelaskan jenis-jenis kekerasan domestik terhadap sebagai berikut. Pertama, kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kedua, kekerasan fisik ialah segala macam tindakan yang mengakibatkan kekerasan fisik pada yang menjadi korbannya. Kekerasan fisik dilakukan dengan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya seperti memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyulut rokok, serta melukai dengan barang atau senjata. Ketiga, kekerasan ekonomi seperti tidak memberikan uang belanja, dan memakai atau menghabiskan uang istri. Keempat, kekerasan emosional yang meliputi mencela, menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, serta mengisolasi istri dari dunia luar.



Kekerasan dalam rumah tangga saat ini juga merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah kasus tertinggi di Jawa Tengah menurut data kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2015 yang dirilis oleh LRC-KJHAM. Terhitung 145 kasus (37.86 %) dari 383 (100 %) kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Jawa Tengah merupakan zona merah dengan angka kekerasan dan anak yang tinggi, seiring banyaknya kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang terjadi, (CNN Indonesia 2016). Kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah terhitung memang terus meningkat setiap tahun, menurut data kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yang dirilis oleh Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia /LRC-KJHAM terdapat 331 kasus pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 383 kasus dan diklasifikasi menjadi 8 jenis kasus yaitu Perkosaan, Perbudakan Seksual, Trafiking, Pelecehan Seksual, Pekerja Migrant, KDRT, KDP, dan Prostitusi. Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar di 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah pada tahun 2015. Namun tentunya masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan atau korban tidak melaporkan kasusnya dengan berbagai alasan seperti dilansir dari website CNN Indonesia, Direktur Legal Resource Center untuk

Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Dian Puspitasari mengatakan bahwa meski kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Tengah tergolong tinggi, namun hanya 10 persen yang diproses hingga pengadilan (CNN Indonesia)

Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yang dirilis oleh LRC-KJHAM tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 383 kasus, hanya terdapat 82 kasus yang mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, 69 diantaranya bantuan yang dilakukan oleh kepolisian (pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan), 11 kasus mendapatkan pendampingan bantuan hukum oleh pengacara, 1 kasus mendapat bantuan dari kejaksaan, serta 1 kasus mendapatkan bantuan dari pengadilan (sipil dan militer). Data tersebut menunjukkan banyaknya kasus yang belum dilaporkan secara hukum (Website resmi LRC-KJHAM).

Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah menjamin setiap hak warga Negara Indonesia seperti dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pemerintah juga telah secara spesifik melakukan upaya untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 1, ayat 2 dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh

negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada ayat 4 dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini khususnya kekerasan dalam rumah tangga, mendorong sebuah lembaga perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan, Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia/LRC KJHAM, menyediakan layanan konseling. Konseling dimaksudkan untuk memfasilitasi korban agar dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan ditempuh korban untuk menuntut keadilan dan tanggung jawab Negara (Website resmi LRC-KJHAM).

Walaupun pemerintah telah menjamin perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seakan mengalami kebingungan sehingga tidak dapat memberikan suaranya untuk melapor secara hukum. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan kebingungan di masyarakat yaitu patriarki, bahkan Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan (2010 :177) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap berasal dari patriarki. Patriarki adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan

atas kaum (Beilharz, 2005: 18). Sedangkan menurut Bhasin (Sugihastuti & Saptiawan, 2010: 177), patriarki merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, serta sistem control terhadap tempat dikuasai.

Bhasin selanjutnya berpendapat bahwa dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada dan harus dikontrol oleh laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa patriarki selalu menempatkan sebagai makhluk yang lemah dan tidak memiliki kuasa apapun terhadap dirinya. Dalam komunikasi keluarga, Johnson dan Leone (dalam LePoire, 2006: 205) juga menyebutkan bahwa kekerasan dalam keluarga dapat digolongkan menjadi dua yaitu *situational couple violence* yaitu kekerasan yang dapat terjadi pada setiap hubungan, dan *patriarchal* atau *intimate terrorism* yang berarti adanya sebuah pola dalam upaya mengendalikan perilaku komunikasi yang mengindikasikan keinginan pelaku yaitu laki-laki untuk mengendalikan dan mendominasi pasangannya dalam budaya patriarki. *Intimate terrorism* biasanya berlangsung secara berulang dan stabil sehingga perempuan merasa bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dan merasa tidak berdaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat diperlukannya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengakuan hak hidup kaum perempuan dan perhatian serius dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga korban termotivasi sehingga mengembalikan kepercayaan diri dan menjalani kehidupan secara normal baik dari segi fisik maupun mental.

1.2 Perumusan Masalah

Angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap yang semakin tinggi setiap tahun di Jawa Tengah sangat memprihatinkan, terlebih kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dimana pasangan yang saling mencintai tidak seharusnya berakhir dengan kekerasan dan adanya fakta bahwa banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib sungguh sangat disayangkan. Tersedianya bantuan dari berbagai pihak seperti kepolisian, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan belum dimanfaatkan dengan maksimal. Para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seakan tetap membisu dan tidak ingin mengungkapkan hal tersebut maupun melaporkannya melalui jalur hukum. Patriarki dianggap salah satu penghalang korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan pelaporan, perempuan seakan dibungkam dan tidak memiliki daya. Hal tersebut membuat penulis tergerak untuk mengetahui bagaimana pengalaman perempuan kekerasan dalam rumah tangga dan apa latar belakang mereka tidak mau melaporkan kasusnya tersebut?. Penelitian ini akan fokus untuk mendeskripsikan esensi pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan latar belakang terjadinya hal tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang berjudul Studi Fenomenologi Feminis: Esensi Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dibagi menjadi tiga macam yaitu signifikansi akademis dan signifikansi praktis dan signifikansi sosial.

1.4.1 Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ilmu komunikasi dalam mengkaji teori-teori mengenai komunikasi dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kelompok bungkam agar selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi untuk kasus-kasus serupa.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu konselor di LRC-KHJAM untuk lebih memahami apa yang menjadi alasan para korban untuk tidak mengungkapkan kasusnya sehingga konselor dapat memutuskan cara yang tepat untuk menangani setiap korban dengan latar belakang berbeda dan memberikan saran-saran yang tepat bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa seorang perempuan.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga pada kemudian hari jika hal tersebut

terjadi pada orang terdekat, pembaca dapat mengetahui tindakan yang tepat untuk membantu korban sehingga korban mendapatkan penanganan yang tepat baik dari segi hukum, fisik, maupun mental dan dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 State of The Art

Peneliti	Judul Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
Sefti Diona Sari.2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro	Memahami Pengalaman Komunikasi Konselor dan Korban KDRT pada Proses Pendampingan Di PPT Seruni	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Komunikasi Antar Pribadi • Teori <i>Self Disclosure</i> • Teori Hubungan Aku-Engkau • Teori Dialogis 	Keterbukaan diri para korban saat menjalani pendampingan sangat diperlukan oleh konselor berkaitan dengan langkah strategi yang harus dijalankan untuk membantu korban menyelesaikan masalahnya. Menyesuaikan diri dengan latar belakang dan kondisi korban dilakukan oleh para konselor dengan penggunaan bahasa yang mudah atau dapat dimengerti oleh korban yang sesuai dengan bahasa sehari-hari korban dapat membuat korban merasa nyaman saat proses

			pendampingan berlangsung
Alfdian Wizqi Putri.2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas. Diponegoro	Kekerasan Simbolik Terhadap dalam Tayangan Komedi Opera Van Java	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Standpoint • Teori feminisme sosialis 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan simbolik terhadap dalam tayangan komedi Opera van Java terjadi dalam bentuk stereotype, domestikasi dan objektifikasi . Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kekerasan simbolik yang terjadi dilatarbelakangi oleh ideologi patriarki dan kapitalisme
Jenny Putri Avianti. 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas. Diponegoro	Representasi dalam Budaya Patriarki (Studi Semiotika Pada Film Sang Penari)	<ul style="list-style-type: none"> • Teori John Fiske “the codes of television” 	Hasil dari penelitian ini yakni pekerja seni terutama penari ronggeng dalam film Sang Penari hanya dianggap sebagai penghibur laki-laki bukan yang memiliki bakat bernyanyi dan menari. Film ini juga menunjukkan kemandirian dan kemampuan penari ronggeng sebagai seorang penghibur atau seniman.

Penelitian dengan judul Memahami Pengalaman Komunikasi Konselor dan Korban KDRT pada Proses Pendampingan Di PPT Seruni memiliki tujuan untuk memahami pengalaman komunikasi antara konselor dan korban KDRT pada

proses pendampingan di PPT Seruni Kota Semarang. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi antarpribadi, teori self disclosure, teori diri oleh Carl Rogers, teori hubungan Aku-Engkau dari Martin Buber, teori dialogis Mikhail Bakhtin. Untuk mendeskripsikan secara detail pengalaman komunikasi antara konselor dengan korban KDRT penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subyek dalam penelitian ini adalah konselor (pendamping) dari PPT Seruni dan korban KDRT yang menjalani pendampingan di PPT Seruni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban agar korban merasa aman dan mendapat perlindungan. Terdapat perbedaan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh konselor saat melakukan pendampingan dengan korban KDRT. Dalam menghadapi korban yang tertutup, konselor berusaha untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pendampingan berkaitan dengan tingkat sensitifitasnya yang lebih tinggi. Sedangkan dengan korban yang terbuka, konselor dapat lebih mudah dalam melakukan pendampingan. Proses dialog antara konselor dengan korban KDRT efektif dijalankan dengan adanya keterbukaan kedua belah pihak dalam menjalankan proses komunikasi. Keterbukaan diri para korban saat menjalani pendampingan sangat diperlukan oleh konselor berkaitan dengan langkah strategi yang harus dijalankan untuk membantu korban menyelesaikan masalahnya.

Penelitian dengan judul Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan dalam Tayangan Komedi Opera Van Java ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam tayangan komedi Opera van

Java dan membongkar ideologi gender dominan yang melatarbelakanginya. Hasil dari analisis kode hermeneutika dalam tayangan ini menggambarkan , perempuan sebagai istri dan ibu, perempuan adalah individu yang tempatnya di rumah, jauh dari sektor produksi Kemudian, perempuan digambarkan sebagai sosok yang bergantung dan tidak dapat menyelesaikan masalah. Kekerasan simbolik terhadap perempuan berdampak pada kondisi psikis, ekonomi serta sosial. Dari segi psikologis, efek yang ditimbulkan adalah ketidaknyamanan bahkan kemarahan. Dari segi ekonomi, perempuan bergantung kepada laki-laki secara finansial. Kemudian dari segi sosial, posisi perempuan selalu inferior terhadap laki-laki. Kekerasan simbolik terhadap perempuan berdampak pada semakin langgengnya dominasi laki-laki dalam masyarakat. Kekerasan simbolik yang terjadi terhadap merupakan bentuk dari dominasi ideologi kapitalisme dan patriarki. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan simbolik terhadap dalam tayangan komedi Opera van Java terjadi dalam bentuk stereotype, domestikasi dan objektifikasi . Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kekerasan simbolik yang terjadi dilatarbelakangi oleh ideologi patriarki dan kapitalisme.

Penelitian dengan judul Representasi Perempuan dalam Budaya Patriarki (Studi Semiotika Pada Film Sang Penari) memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan di representasikan dalam film Sang Penari. Film ini menggambarkan budaya patriarki yang sangat lekat dengan budaya Jawa. Ketimpangan gender dan penindasan terhadap perempuan penari ronggeng memunculkan wacana yang berkembang di masyarakat bahwa ronggeng identik dengan kekerasan dan praktik pelacuran terselubung. Penggunaan istilah “tradisi”

menjadikan penari ronggeng sebagai perempuan terhormat dan memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Akan tetapi, status terhormat tersebut hanya untuk melegalkan proses pelacuran terselubung pada penari ronggeng. Hasil dari penelitian ini yakni pekerja seni terutama penari ronggeng dalam film Sang Penari hanya dianggap sebagai penghibur laki-laki bukan sebagai perempuan yang memiliki bakat bernyanyi dan menari. Film ini juga menunjukkan kemandirian dan kemampuan perempuan penari ronggeng sebagai seorang penghibur atau seniman.

Berbagai penelitian di atas merefleksikan kekerasan yang terjadi kepada perempuan, penelitian pertama lebih menekankan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh konselor untuk membantu para korban menyelesaikan masalahnya dan bagaimana membangun komunikasi yang baik sehingga tujuan tercapai. Penelitian kedua menjabarkan mengenai kekerasan simbolik terhadap perempuan yang ada dalam tayangan Opera Van Java dan dikaitkan dengan patriarki dan kapitalisme sehingga membentuk berbagai stereotype bahwa perempuan itu lemah dan tidak dapat menentukan suatu keputusan. Penelitian terakhir menjabarkan mengenai perempuan pekerja seni terutama penari ronggeng dalam film Sang Penari yang hanya dianggap sebagai penghibur laki-laki bukan perempuan yang memiliki bakat bernyanyi dan menari. Beberapa penelitian tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kekerasan yang terjadi di dalam lingkup domestik atau biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak banyak di bahas dalam penelitian sebelumnya. Terlebih adanya suatu fakta bahwa banyak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak memproses kasusnya merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan

fokus untuk mendeskripsikan esensi pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan latar belakang dibalik pengalaman tersebut.

1.5.2 Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, Agus Salim (2006: 70) mengemukakan bahwa aliran ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma, akan tetapi lebih tepat disebut *ideologically oriented inquiry*, yaitu suatu wacana atas realitas dengan muatan orientasi ideologi tertentu. Selanjutnya, Agus Salim (2006: 71) mengemukakan bahwa secara ontologis, cara pandang aliran ini sama dengan pandangan post-positivisme, khususnya dalam menilai objek atau realitas kritis (*critical realism*), yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia. Berangkat dari masalah ini, pada tataran metodologis, aliran ini mengajukan metode dialog sebagai sarana transformasi bagi ditemukannya kebenaran realitas yang hakiki. Pada tataran epistemologis, aliran ini memandang hubungan antara periset dan objek sebagai hal tak terpisahkan. Lantaran berkeyakinan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh periset ikut serta menentukan kebenaran sesuatu hal, maka aliran ini sangat menekankan konsep subjektivitas dalam menemukan suatu ilmu pengetahuan.

Penelitian dengan paradigma kritis menekankan pada ideologi, dalam penelitian ini yaitu feminisme sosialis. Sunarto (2009: 36) mengemukakan bahwa feminisme sosialis melihat penindasan terhadap perempuan itu disebabkan oleh saling keterkaitan antara kapitalisme dan patriarkisme. Menurut perspektif ini, penindasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh hasil tindakan intensif

individual tetapi merupakan produk dari struktur politik, sosial, ekonomi di mana individu itu hidup. Menurut aliran ini, jender sebagai konstruksi sosial yang melihat peran sosial antara pria dan perempuan secara berbeda, merupakan satu alat analisis penting yang dimunculkan oleh pemikiran ini. Sunarto (2009: 37) mengemukakan bahwa aliran ini berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh hewan buas berkepala dua yaitu kapitalisme dan patriarkisme baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, kedua ideology tersebut telah menyebabkan penindasan terhadap perempuan.

Fungsi sebagai pelaksana reproduksi tenaga kerja menjadikan posisi perempuan penting dalam menyediakan cadangan tenaga kerja bagi kaum kapitalis. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai patriarkis dan kapitalis dilakukan oleh kaum perempuan dalam posisinya sebagai pengasuh anak-anak mereka. Selain itu, kaum perempuan juga berfungsi untuk menjaga stamina tenaga kerja agar siap bekerja kembali keesokan harinya melalui perawatan dan pelayanan pada suami-suami mereka. Dalam sistem patriarkisme dan kapitalisme semua yang dilakukan kaum perempuan sebagai pelaksanaan reproduksi tenaga kerja dan calon tenaga kerja itu merupakan suatu kondisi yang normal dan wajar (Sunarto, 2009:37)

1.5.3 Teori Kelompok Bungkam

Teori Kelompok Bungkam berawal dari karya Edwin dan Shirley Ardener, para antropolog sosial yang tertarik dengan struktur dan hierarki sosial. Pada tahun 1975, Edwin Ardener menyatakan bahwa kelompok yang menyusun bagian teratas dari hierarki sosial yang menentukan sistem komunikasi bagi budaya tersebut.

Kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti perempuan, kaum miskin, dan orang kulit berwarna , harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan. (West dan Turner, 2008: 197). Setelah konsep mendasar yang dijabarkan oleh Edwin dan Shirley Ardener, Cheri Kramae (dalam West dan Turner, 2008: 201) kemudian membangun teori ini untuk berfokus pada komunikasi.

Teori Kelompok Bungkam ini menjelaskan bahwa perempuan berusaha untuk menggunakan bahasa yang diciptakan laki-laki untuk mendeskripsikan pengalaman mereka dalam cara yang sama seperti halnya penutur asli bahasa Indonesia belajar bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Untuk melakukan hal tersebut, mereka harus melalui proses penerjemahan internal, mencari kosakata asing untuk mendapatkan terbaik untuk mengungkapkan pikiran mereka. Proses ini membuat mereka ragu dan sering kali tidak lancar ketika mereka tidak mampu menggunakan bahasa dengan fasih demi tujuan mereka (West dan Turner, 2008: 196). Cheri Kramae selanjutnya mengemukakan teori Kelompok bungkam dengan beberapa asumsi sebagai berikut :

- Perempuan mempersepsikan dunia secara berbeda dibandingkan pria karena pengalaman pria dan perempuan yang berbeda serta adanya kegiatan-kegiatan yang berakar pada pembagian pekerjaan.
- Karena dominasi politik mereka, sistem persepsi pria dominan, menghambat ekspresi bebas dari model alternatif perempuan mengenai dunia.

- Agar dapat berpartisipasi di masyarakat, perempuan harus mentransformasi model mereka sendiri sesuai dengan sistem ekspresi pria yang diterima.

Asumsi pertama dimulai dengan premis bahwa dunia adalah tempat yang berbeda bagi pria dan perempuan dan bahwa pengalaman mereka juga berbeda. Selain itu, asumsi ini menjelaskan penjelasan bagi perbedaan ini yaitu mengenai pembagian pekerjaan yang mengalokasikan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, misalnya perempuan bertanggung jawab untuk tugas-tugas di rumah (privat) dan pria bertanggung jawab untuk pekerjaan di luar rumah (publik) (West dan Turner, 2008: 201). Ketika pekerjaan orang berbeda maka mereka cenderung untuk melihat dunia dengan cara-cara yang berbeda.

Asumsi kedua menyatakan bahwa pria adalah kelompok yang dominan dan pengalaman mereka lebih dipilih dibandingkan pengalaman perempuan. Secara khusus, pria bertugas untuk memberikan nama dan label pada kehidupan sosial, dan sebagai akibatnya pengalaman perempuan sering kali tidak memiliki nama (West dan Turner, 2008: 203). Teori Kelompok Bungkam menyatakan bahwa masalah tersebut bukan hasil dari ketidakmampuan perempuan, melainkan disebabkan tidak responsifnya bahasa yang dimiliki perempuan untuk mengekspresikan dirinya (West dan Turner, 2008: 204).

Asumsi ketiga menjelaskan mengenai proses penerjemahan yang harus dilakukan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tugas perempuan adalah mengkonseptualisasi sebuah pemikiran dan kemudian mencari kosakata, yang lebih sesuai dengan pemikiran pria, agar mendapatkan kata-kata

yang terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut (West dan Turner, 2008: 205). Sebagai contoh, pada sekitar tahun 1970, istilah pelecehan seksual (*sexual harassment*) tidak ada, perempuan yang mengalami apa yang kini disebut dengan pelecehan seksual tidak memiliki kata apapun untuk mendeskripsikan pengalaman mereka.

1.5.3.1 Proses Pembungkaman

Pemikiran utama dari teori kelompok bungkam adalah anggota-anggota kelompok yang termarginalkan dibungkam dan dianggap sebagai penutur yang tidak fasih. Pembungkaman tidak tergantung pada pemaksaan, namun pembungkaman kelompok bungkam ini merupakan fenomena yang terjadi secara sosial. Tidak seperti pidato atau orasi yang hanya membutuhkan satu aktor, pembungkaman membutuhkan kolaborasi dan pemahaman bersama kolaborasi tersebut sangat dibutuhkan. Walaupun hal ini bukan semacam kontrak, ciri penting dari pembungkaman ini merupakan gambaran tidak meratanya suatu kekuasaan dan seterusnya kebungkaman dicapai melalui pemahaman sosial mengenai siapakah yang mempunyai kekuasaan maupun tidak (West dan Turner, 2008: 206).

Proses pembungkaman dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu mengejek, ritual, kontrol, dan pelecehan. Houston dan Kramae (dalam West dan Turner, 2008: 206) menyatakan bahwa pembicaraan perempuan diremehkan. Pria menganggap bahwa perempuan selalu menghabiskan waktu di telepon untuk melakukan pembicaraan yang tidak penting, sedangkan perempuan sendiri sering menyebut pembicaraannya dengan berceloteh atau bergosip. Perempuan juga

sering diberitahu bahwa mereka tidak memiliki selera humor dan hal tersebut menjadi bahan untuk diejek. Selain itu, kekhawatiran perempuan juga sering dijadikan hal yang tidak penting untuk didengar, namun perempuan diharapkan untuk menjadi pendengar yang baik bagi pria. Metode kedua untuk mencapai pembungkaman adalah ritual, ritual sosial sering terjadi dalam berbagai upacara seperti pernikahan. Perempuan terlihat seperti bawahan pria, seperti dalam upacara pernikahan yang banyak dilakukan Jawa Tengah bahwa hanya laki-laki yang mengucapkan sumpah kemudian pengantin perempuan datang setelah resmi secara hukum sebagai suami istri.

Metode ketiga dalam mencapai pembungkaman yaitu kontrol, para peneliti telah mengamati bahwa laki-laki banyak menentukan keputusan besar. Selain itu media juga dikuasai oleh pria, pembicaraan dan kontribusi perempuan jarang diliput dalam media. Metode terakhir yaitu pelecehan, Elizabeth Kissling (dalam West dan Turner, 2008: 209) mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki akses bebas di jalan umum. Pelecehan seksual di tempat kerja juga merupakan metode lain untuk mengatakan bahwa mereka tidak sesuai dengan dunia diluar area domestik mereka.

1.5.4 Jenis Kekerasan

Hasbiyanto (dalam Sugihastuti & Saptiawan, 2010:173) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Meiyenti (dalam Sugihastuti

&Saptiawan, 2010:173) menjelaskan jenis-jenis kekerasan domestik terhadap sebagai berikut. Pertama, kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kedua, kekerasan fisik ialah segala macam tindakan yang mengakibatkan kekerasan fisik pada yang menjadi korbannya. Kekerasan fisik dilakukan dengan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya seperti memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyulut rokok, serta melukai dengan barang atau senjata. Ketiga, kekerasan ekonomi seperti tidak memberikan uang belanja, dan memakai atau menghabiskan uang istri. Keempat, kekerasan emosional yang meliputi mencela, menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, serta mengisolasi istri dari dunia luar.

Sunarto (2009:56) mengacu pada Windhu, Luhulima, dan Fry mengemukakan bahwa kekerasan sendiri mempunyai beberapa dimensi, antara lain: (1) bentuk kekerasan (fisik, psikologis, finansial, spiritual, dan fungsional); (2) efek kekerasan (negatif atau positif); (3) partisipan kekerasan (subjek atau objek); (4) motif kekerasan, dan (5) sumber kekerasan (struktural atau personal).

Poerwandari (dalam Sunarto, 2009: 57) mengemukakan bahwa kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh, menginjak, melukai dengan tangan kosong maupun dengan senjata/alat, menganiaya, menyiksa dan membunuh. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelak terhadap mental korban dengan cara berteriak-teriak,

menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, memata-matai, dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk diarahkan kepada orang-orang yang dekat dengan korban, misal: keluarga). Kekerasan seksual meliputi tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa melakukan aktifitas –aktifitas seksual yang tidak disukai, dan pornografi. Sedangkan kekerasan finansial adalah tindakan mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran sampai sekecil-kecilnya. Kekerasan spiritual berwujud merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini apa yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu. Kekerasan fungsional yaitu pembatasan peran sosial perempuan hanya sebagai istri, ibu rumah tangga dan pelaksana fungsi reproduksi lainnya.

1.5.5 Asumsi Penelitian

Peneliti meyakini bahwa esensi pengalaman perempuan kekerasan dalam rumah tangga ini berhubungan dengan faktor struktural dan kultural yang dipengaruhi dengan adanya dua ideologi dominan yaitu patriarki dan kapitalisme. Seperti yang telah dijelaskan diatas, kebungkaman ini merupakan fenomena yang terjadi secara sosial. Kelompok dominan (pria) berkolaborasi untuk menciptakan pemahaman sosial mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki

kekuasaan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya sistem patriarki yang merupakan sistem dominasi dan superioritas laki-laki, serta sistem kontrol terhadap tempat dikuasai dan pria diistimewakan. Secara struktural, kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk penundukan yang berbasis kelas yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih inferior dibandingkan laki-laki. Secara kultural, budaya patriarki memberikan legitimasi terhadap keniscayaan kekerasan terhadap perempuan. Connel (dalam Sugihastuti & Saptiawan, 2010:177) menyatakan bahwa ideology kultural secara hegemonis berfungsi untuk menjaga keberlangsungan suatu sistem pengetahuan dan kebenaran yang diciptakan oleh kelompok dominan. Keberlangsungan atau reproduksi budaya ini berlangsung dengan diciptakannya berbagai unsur penyangga seperti keluarga, agama, negara, pendidikan, politik dan birokrasi, hukum dan media massa. Dalam kaitannya dengan persoalan gender, unsur-unsur penyangga ini bekerja membentuk citra, mitos, serta terefleksi dalam relasi kuasa secara interpersonal. Banyak perempuan yang tidak melaporkan kasusnya disebabkan faktor kultural inilah menyebabkan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga dianggap sebagai hal yang wajar terjadi, ditambah dengan adanya faktor struktural dimana perempuan (istri) merupakan milik laki-laki (suami) sehingga laki-laki dapat melakukan apapun kepada perempuan (istri). Walaupun mungkin perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merasa bahwa hal tersebut tidak adil, mereka tidak dapat mengemukakan menceritakan tentang apa yang dialami karena mereka merasa tidak akan didengarkan dan adanya ketakutan akan mengecewakan dan mencemarkan nama keluarga jika kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan

hal privasi tersebut diketahui oleh masyarakat luas jika mereka melaporkan ke polisi dan ketakutan justru akan berada dalam posisi bersalah di masyarakat karena dianggap tidak berhasil menjadi perempuan yang sesuai untuk keluarga sehingga wajar sang suami memberikan hukuman dengan cara melakukan berbagai kekerasan dalam rumah tangga.

1.6 Metoda Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tipe deskriptif, pendekatan kualitatif, dan desain penelitian fenomenologi feminis. Hasil transkrip wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis fenomenologi interpretive.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif

1.6.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi kritis dan lebih khusus dengan fenomenologi feminis untuk menggambarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Littlejohn (dalam Ninik Sri Rejeki dan kawan-kawan, 2011: 135) mengemukakan bahwa dalam fenomenologi terdapat asumsi pokok yaitu manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu interpretasi merupakan proses yang aktif untuk memberikan makna atas sesuatu yang dialami manusia. Engkus Kuswarno (2009: 2) juga mengemukakan bahwa fenomenologi mencoba untuk mencari pemahaman bagaimana

mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia yang dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Husserl dikenal dengan fenomenologi transedentalnya. Tujuan pokok dari fenomenologi transedental adalah guna menjelaskan makna yang esensial dari objek-objek pengalaman melalui suatu penelitian tentang cara-cara penampakan mereka. Husserl mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian fenomenologi penelitian hendaknya bebas dari segala prasangka (Sobur, 2013: 29-30).

Fenomenologi semakin berkembang, Merleau-Ponty menyatakan bahwa fenomenologi bisa dipraktekkan dan didefinisikan sebagai suatu pemikiran (dalam Simms dan Stawarska, 2013: 8). Selanjutnya Merleau-Ponty dan Bourdieu mengemukakan bahwa proses berfikir harus diartikan sebagai sesuatu yang berwujud (*embodied*) yang berada dalam konteks sosial dan memiliki efek politik dan berfikir merupakan cara untuk menemukan diri kita pada orang lain dan sebaliknya (dalam Melancon, 2014: 1). Pemikiran Merleau-Ponty dan Bourdieu tersebut merupakan dasar terbentuknya fenomenologi kritis yang kemudian dirumuskan oleh Jerome Melancon sebagai berikut :

“Critical phenomenology, beyond the necessary task for thinkers of questioning prejudices and presuppositions, is the reflection on our own situation and those of the people who surround us by the constant confrontation of what unites and separates us, from our body to our most abstract thoughts- the radical attempt to understand our lives through those of others.”

Jerome Melancon mengemukakan bahwa fenomenologi kritis adalah suatu refleksi dari situasi diri kita dan orang-orang disekitar kita dengan konfrontrasi secara konstan apa yang menyatukan dan memisahkan kita dari diri kita maupun pikiran

yang paling abstrak diri kita - untuk memahami hidup kita melalui orang lain (Melancon, 2014: 26). Epoche milik Husserl juga telah berkembang dalam gerakan fenomenologi saat ini, epoche menuntut kita untuk memahami atau mempertanyakan kendala maupu prasangka sosial-kultural dimana kita berada dan menerima bahwa kita tidak pernah dapat sepenuhnya melakukan reduksi dan memandang fenomena sebagai mana adanya (Simms and Stawarska, 2013: 10-11).

Selanjutnya Emma-Maria Simms dan Beata Stawarska menegaskan bahwa:

“ A critical phenomenology understands the contingencies of human experience and consciousness and works on understanding and pervasive influences of ideology, politics, language, and power structures as they construct and contrains the lived experiences of people.”

Secara lebih khusus penelitian ini akan menggunakan fenomenologi feminis. Fenomenologi feminis sering dikaitkan dengan Simone de Beauvoir dan karyanya yaitu *The Second Sex*, Beauvoir dianggap sebagai pencetus awal adanya fenomenologi feminis. Dalam melakukan penelitian fenomenologi banyak orang beranggapan bahwa peneliti harus meneliti tanpa prasangka. Namun berbeda dengan fenomenologi feminis, pemikiran feminis dalam penelitian fenomenologi semakin memperkaya pengetahuan untuk mencapai pemahaman tentang pengalaman hidup seorang perempuan seperti yang dikemukakan Langellier (dalam Dukas, 2014: 24) sebagai berikut:

“ Phenomenology and feminsism mutually inform and enrich each other. Feminism encourages the situation of phenomenological analysis of women’s lived experiences within the social differences unavoidable in society built upon inequalities. Phenomenology cautions agains merely imposing feminist interpretations on womens’s live experience”

Seperti Langellier, Fisher (dalam Dukas turut memperkuat pandangan bahwa fenomenologi dan feminis merupakan perpaduan yang baik untuk melihat

fenomena yang terjadi pada perempuan dalam hal ini khususnya pengalaman kekerasan dalam rumah tangga.

“Each component contributes something vital, which enhances the possibilities of both. Phenomenology can provide the style for an analysis which retrieves and retains the immediate, vibrant, tangible, and compelling lived experience, and enables our understanding of the phenomena and meanings of this lived experience and situation; while feminist thought and analysis can expand and deepen phenomenological investigation by recalling and insisting on the importance of the lived context, and the multiple aspects, particularities, and dynamics of the social and cultural world, of social and political being in that world, and the necessity of a phenomenological analysis and framing of these phenomena. In this manner, the enhanced presence and timbre of the feminist voice in phenomenology, and the phenomenological voice in feminism, can bring forth the clear and distinctive tones of the feminist phenomenological voice”

Garko (dalam Dukas, 2014: 25) juga menyoroti hal yang sama mengapa fenomenologi feminis terutama yang melibatkan peserta perempuan secara metodologis kompatibel dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting yang mendukung teori feminis. Khususnya investigasi dan pemahaman tentang pengalaman hidup perempuan adalah hal terpenting bagi feminisme dan fenomenologi. Keduanya berorientasi pada keterbukaan, deskripsi dan pemahaman, serta kedua juga mempunyai persamaan untuk menentang adanya objektivitas yang mutlak atau kebenaran akan dikotomi subjek-objek dapat terjadi. Pada akhirnya, dalam melakukan penelitian fenomenologi feminis, peneliti harus melihat dua sisi, yaitu apa yang dikatakan oleh subyek dan menyingkap apa yang subyek tidak atau tidak bisa mengatakannya melainkan latar belakangnya, seperti yang dikemukakan Simms dan Stawarska dibawah ini :

“ Feminist phenomenologist do a ‘double book-keeping’: note what the participant says, but also uncover what she does not or cannot say but what structures her discourse”.

1.6.3 Situs Penelitian

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

1.6.4 Subjek Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel dalam studi kualitatif memiliki karakter sebagai berikut (Salim, 2007: 12) :

(1) tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kekhususan kasus (spesifik) sesuai dengan masalah penelitian; (2) tidak menentukan secara kaku sejak awal, namun dapat berubah di pertengahan sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan yang berkembang selama proses studi (pemilihan subjek sebagai sampel dapat berubah setelah ada penentuan jenis informasi baru yang hendak dipahami); dan (3) tidak diarahkan pada keterwakilan/representasi, melainkan pada kecocokan pada konteks (siapa dengan jenis informasi apa). Dengan demikian dalam studi kualitatif secara umum digunakan model pengambilan sampel *purposive* (ditentukan selaras dengan tujuan studi).

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan subjek penelitian. Peneliti ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, dan subjek penelitian yang dipilih memiliki pemahaman dan pengalaman tentang apa yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang perempuan yang pernah atau sedang mengalami KDRT dan bertempat tinggal di Semarang.

1.6.5 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:308). Data yang diperoleh langsung didapat dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, yang berguna untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan peneliti. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:309). Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan interaksi langsung dengan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data kekerasan dalam rumah tangga yang dimiliki oleh LRC-KJHAM.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Engkus Suwarno (2009: 66) mengemukakan bahwa pengumpulan data yang utama pada penelitian fenomenologi adalah wawancara mendalam atau wawancara kualitatif karena dengan metode inilah esensi dari fenomena yang diamati dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengamatinya langsung). Wawancara mendalam (*indepth interview*). Burhan Bungin (2007: 111)

mengemukakan bahwa wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

1.6.7 Analisis dan Interpretasi Data

Moustakas (dalam Engkus Kuswarno, 2009: 70) menyajikan teknik analisis data fenomenologi yang dimodifikasi dari Stevick-Colaizzi-Keen sebagai berikut :

1. Deskripsi lengkap peristiwa/fenomena yang dialami langsung oleh informan
2. Dari pernyataan-pernyataan verbal informal, kemudian :
 - a. Menelaah setiap pernyataan verbal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
 - b. Merekam atau mencatat pernyataan yang relevan tersebut.
 - c. Pernyataan-pernyataan yang telah dicatat kemudian dibuat daftarnya (invariant horizons/unit makna fenomena) dan tidak ada pernyataan yang tumpang tindih atau berulang
 - d. Mengelompokkan setiap unit makna ke dalam tema-tema tertentu.
 - e. Membuat sintesis dari unit-unit makna dan tema (deskripsi tekstural), termasuk pernyataan verbal yang menjadi inti unit makna.

f. Dengan mempertahankan refleksi penjelasan structural diri sendiri melalui varian imajinasi, peneliti membuat konstruk deskripsi struktural.

g. Menggabungkan deskripsi tekstural dan structural untuk menentukan makna dan esensi dari fenomena.

3. Peneliti melakukan tahap pada bagian 2 pada setiap informan.

4. Peneliti membuat penjelasan menyeluruh dari setiap makna dan esensi fenomena yang didapat.

1.6.8 Kualitas Data

Agus Salim (2007: 104) mengemukakan bahwa teori kritis berpandangan bahwa unsur kebenaran adalah melekat pada *historical situatedness of the inquiry*, keterpautan antara tindakan penelitian dengan situasi historis yang melingkupi. Penelitian tidak dapat terlepas dari konteks tertentu, di samping itu peneliti juga harus mengembangkan upaya *conscientization* atau kesadaran. Hal ini menuntut sikap ekstra hari-hati dalam kegiatan penelitian, karena kegiatan penelitian dapat mengungkap ketidaktahuan dan salah pengertian. Tidak semua asumsi dan teori dapat memuat kebenaran, sehingga dalam proses kegiatan penelitian dimungkinkan pula diperoleh wawasan baru dalam cara berpikir tertentu. Bagaimana membangun kesatuan teori dan praksis (*unity of theory and praxis*) Kesatuan seperti ini tidak lain adalah tindakan yang dapat mendorong terjadinya transformasi dalam struktur kehidupan.

